

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok, sebagai berikut (Resmi, 2019):

1. Menurut golongan

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

2. Menurut Sifat

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Pengenaan PPh untuk orang pribadi memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya) yang digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut lembaga pemungut

- a. Pajak Negara (pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009, didalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan bahwa jenis pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pajak Provinsi yang terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan

2.2 Kriteria Pajak Daerah

Pajak daerah mempunyai beberapa kriteria, yaitu:

1. Pungutan bersifat pajak bukan retribusi

Pungutan tersebut harus sesuai definisi pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang, yaitu kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/Kota yang bersangkutan.

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pajak ditujukan untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak pusat.

5. Aspek kemampuan masyarakat.

Pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak, sehingga sebagian besar beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sementara objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa yang termasuk dalam bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan tol.
- c. Kolam renang.
- d. Pagar mewah.
- e. Taman mewah.
- f. Tempat olah raga.
- g. Galangan kapal/dermaga.
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- i. Menara.
- j. Fasilitas lainnya yang memberikan manfaat.

2.4 Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Namun, penetapan tarif PBB-P2 secara lebih lanjut ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah dengan menggunakan peraturan daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 18 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah, Kabupaten Tangerang menetapkan tarif PBB-P2 sebagai berikut:

- a. 0,15% untuk total NJOP paling besar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- b. Tarif sebesar 0,2% untuk total NJOP lebih dari Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- c. 0,225% untuk total NJOP lebih dari Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak dan ditetapkan dengan peraturan daerah. PBB-P2 yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak setelah

dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Berikut ini contoh perhitungan PBB-P2:

Wajib Pajak B mempunyai objek pajak di Kabupaten X berupa tanah seluas 500m² dengan harga jual Rp600.000/m², bangunan seluas 400m² dengan nilai jual Rp1.000.000/m². Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. NJOP Bumi | : 500 x Rp600.000 | = Rp300.000.000 |
| 2. NJOP Bangunan | : 400 x Rp1.000.000 | = <u>Rp400.000.000 +</u> |
| 3. NJOP Bumi dan Bangunan | | = Rp700.000.000 |
| 4. NJOPTKP | | = <u>Rp10.000.000 -</u> |
| 5. NJOP Kena Pajak | | = Rp690.000.000 |
| 6. Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah | 0,15% | |
| 7. PBB-P2 terutang | : 0,15% x Rp690.000.000 | = <u>Rp1.035.000</u> |

Sehingga jumlah PBB-P2 terutang atas objek pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak B sebesar Rp1.035.000

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) digunakan untuk mendaftarkan objek pajak yang dimiliki oleh subjek pajak. SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah. SPOP yang diberikan kepada wajib pajak PBB-P2 harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada kepala daerah atau dinas yang

menangani PBB yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SPOP oleh wajib pajak.

Kepala daerah akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berdasarkan data SPOP. SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak. Namun, dalam membantu wajib pajak, SPPT diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada di dinas yang menangani PBB di wilayahnya (Resmi, 2016). Ketika SPPT telah terbit, maka wajib pajak tidak diharuskan menghitung sendiri pajak terutangnya karena jumlah pajak yang harus dibayarkan wajib pajak telah dihitung oleh petugas perpajakan. Hal ini disebabkan oleh sistem pemungutan pajak untuk PBB-P2 yang menganut *Official Assesment System*, yang berarti aparatur perpajakan diberikan wewenang untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Waluyo, 2017).

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Kepala daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis oleh kepala daerah atau berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Apabila wajib pajak

tidak menyampaikan SPOP akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) diterbitkan oleh kepala daerah apabila SPPT atau SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dan paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Menurut Pari (2013), Apabila STPD tetap belum dibayarkan oleh wajib pajak, maka akan dikeluarkan Surat Teguran. Dalam surat ini wajib pajak dikenakan denda administrasi 2% perbulan dan jangka waktu surat teguran ini adalah 21 (dua puluh satu) hari. Langkah selanjutnya dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan setelah terbitnya Surat Teguran adalah menerbitkan Surat Paksa. Penagihan dengan Surat Paksa dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Surat ini diterbitkan apabila wajib pajak tetap tidak membayarkan pajaknya dalam jangka waktu 21 hari Surat Teguran. Jangka waktu surat ini adalah 2 x 24 jam dimana dalam waktu tersebut wajib pajak harus melunasinya. Apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu tersebut, maka dilakukan

penyitaan oleh Juru Sita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Tujuan penyitaan adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan pajak dan biaya penagihannya dari penanggung pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain termasuk penguasaannya di pihak lain, misalnya disewakan atau dipinjamkan. Jika telah lampau 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi pajaknya, maka Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mengajukan permintaan penetapan waktu dan tempat pelelangan kepada Kantor Lelang Negara setempat. Hal ini dilakukan sebagai peringatan terakhir kepada wajib pajak/penanggung pajak untuk melunasi pajaknya. Apabila wajib pajak yang bersangkutan masih juga tidak melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya, maka akan dilaksanakan pelelangan sebagai Tindakan akhir dari proses penagihan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Menurut Resmi (2016), pembayaran dan penyeteron PBB-P2 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak yang terutang dengan menggunakan SPPT, SKPD, atau STPD
2. Pembayaran pajak yang terutang dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD)
3. Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran, yaitu:
 - a. Paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT

- b. Paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
4. Pembayaran pajak bisa dilakukan di ATM atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikota.

Dalam melakukan pemungutan atas PBB-P2, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tangerang menyediakan beberapa fitur layanan untuk melakukan pembayaran PBB-P2 dengan mudah, seperti:

1. Pembayaran PBB melalui bank yang ditunjuk oleh BAPENDA, yaitu bank BJB dan juga melalui pos indonesia.
2. Pembayaran PBB melalui mobil keliling
3. Pembayaran PBB secara Online melalui Tokopedia, dan Bukalapak
4. Pembayaran PBB di ritel seperti Alfamart dan Indomart
5. Pembayaran PBB di UPT wilayah setempat

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Purbo (2012) dalam Siregar dan Rahayu (2018) kepatuhan adalah perilaku atas tindakan wajib pajak yang taat pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk tidak dilanggar. Kepatuhan dapat terlaksana karena adanya kesadaran dan kemauan diri sendiri. Wajib pajak yang patuh menurut Utomo (2011) dalam Ayunda (2015) adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Ada 2 (dua) macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Sedangkan, kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi jiwa Undang-Undang perpajakan.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah yang penting, karena jika banyak Wajib Pajak yang tidak patuh maka akan menghambat pemasukan negara dan pemerintah tidak dapat melakukan berbagai kegiatan pembiayaan yang ditujukan untuk kemakmuran masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak berbasis *official assessment* menurut Widiastuti dan Laksinto (2014) dalam Siregar dan Rahayu (2018) adalah memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak memiliki pajak yang tertunggak. Penetapan jumlah pajak akan ditentukan oleh fiskus/pemerintah dan Wajib Pajak hanya menyeter serta melaporkannya secara rutin dan harus tepat waktu sehingga tidak mempunyai tunggakan pajak. Dengan kata lain, Wajib Pajak dikatakan patuh apabila memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Ketepatan waktu pembayaran pajak bisa dijadikan acuan untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak, ketepatan waktu yang dimaksud adalah mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dan melakukan pembayaran pajak sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakannya. Apabila semua indikator telah terpenuhi, maka kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan akan tinggi.

2.6 Pengetahuan Pajak

Menurut Kamus Besar Indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui; kepandaian; atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal mata pelajaran. Menurut Ayunda (2015), pengetahuan pajak adalah pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia serta manfaat pembayaran pajak yang perlu dimiliki oleh seluruh Wajib Pajak.

Menurut Nur Imaniyah dan Bestari Dwihandayani (2008) dan Carola Ditta Surya Putri (2013) dalam Ayunda (2015), indikator yang bisa digunakan untuk mengukur pengetahuan pajak seorang Wajib Pajak adalah memahami definisi pajak serta kegunaannya, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, mengetahui prosedur dan pembayaran PBB bahwa pajak yang dipungut sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan dan Undang-Undang. Dengan dimilikinya semua pengetahuan akan pajak ini diharapkan Wajib Pajak tidak menjadikan hal ini sebagai ilmu pengetahuan semata, tetapi pengetahuan ini diterapkan dalam dunia nyata melalui kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2.7 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Dengan dimilikinya semua pengetahuan pajak oleh Wajib Pajak, diharapkan Wajib Pajak tidak hanya menjadikan hal ini hanya sebagai ilmu pengetahuan semata, tetapi diterapkan dalam dunia nyata melalui kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pengetahuan akan arti serta fungsi pajak dan tata cara prosedur pembayaran pajak membantu Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban

perpajakan dengan baik dan benar, sehingga Wajib Pajak akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan sehingga nantinya akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Noormala (2008) dalam Budhiartama dan Jati (2016), pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan dibayarkan maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, apabila Wajib Pajak mempunyai pengetahuan mengenai arti penting dan manfaat pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara, maka Wajib Pajak dengan sukarela melakukan pembayaran pajak secara disiplin sehingga akan timbul niat untuk patuh terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Budhiartama dan Jati (2016) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak tentang pajak, maka semakin patuh Wajib Pajak tersebut dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayunda *et al.*, (2015) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Fitrianiingsih, Sudarno, dan Kurrohman (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha₁: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

2.8 Sikap Wajib Pajak

Sikap dapat diartikan sebagai kecendrungan (*tendency*) untuk mendekati (*approach*) atau menjauhi (*avoid*), atau melakukan sesuatu, baik secara positif maupun secara negatif terhadap suatu lembaga, peristiwa, gagasan, atau konsep (Howard Kendle). Dengan demikian, sikap Wajib Pajak dapat berupa kecendrungan untuk melakukan sesuatu, baik mendekati atau menjalankan maupun tidak menjalankan kewajiban perpajakannya.

Menurut Indrawijaya (2003) dalam Ayunda (2015), Sikap (*attitude*) adalah suatu cara beraksi terhadap suatu rangsangan yang tinggi dari seseorang atau dari suatu situasi. Menurut Sulud Kahono (2003) dan Kautsar Riza, Mochammad Farid (2008) dalam Ayunda (2015), Wajib Pajak mendukung pembayaran pajak dengan sistem yang lebih mudah. Apabila Wajib Pajak terlambat dalam membayar pajak dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan maka Wajib Pajak tersebut akan dikenakan sanksi. Pajak Bumi dan Bangunan juga merupakan bentuk partisipasi dan pengabdian masyarakat daerah guna menunjang pembangunan daerah. Dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan maka akan membantu Pemerintah Daerah untuk membangun fasilitas umum yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga harus mendorong Wajib Pajak agar patuh dalam memenuhi kewajibannya dengan cara meningkatkan mutu petugas pelayanan pajak. Sikap seorang Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang patuh apabila wajib pajak mendukung sistem pemungutan PBB

lebih mudah untuk dimengerti, mengetahui adanya sanksi apabila telat membayar PBB, serta mendukung realisasi PBB untuk membangun fasilitas umum di daerah tersebut dan juga mendukung program pemerintah dengan meningkatkan kualitas pelayanan.

2.9 Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Sikap Wajib Pajak adalah kecendrungan untuk melakukan sesuatu, baik mendekati atau menjalankan maupun tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut Ayunda (2015) sikap Wajib Pajak dapat dilihat dari sikap Wajib Pajak mengenai sistem pemungutan PBB, sanksi PBB, realisasi PBB, dan kualitas petugas pelayanan PBB. Sistem yang sederhana akan memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penegasan terhadap sanksi juga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena sanksi denda akan merugikan Wajib Pajak sendiri. Dengan adanya pembangunan infrastruktur di daerah baik berupa Rumah sakit, dan lainnya sebagai bentuk realisasi PBB maka Wajib Pajak akan lebih patuh untuk membayar pajak karena Wajib Pajak telah merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar. Selain itu, dengan adanya petugas pelayanan pajak yang baik akan membuat Wajib Pajak merasa puas sehingga Wajib Pajak akan patuh dalam membayar pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayunda *et al.*, (2015) menyatakan bahwa sikap Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Hal ini sejalan dengan penelitian Budhiartama dan Jati (2016) yang menyatakan bahwa Sikap Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha₂: Sikap Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

2.10 Sanksi Pajak

Menurut Pranandata (2014) dalam Siregar dan Rahayu (2018), sanksi merupakan alat kontrol yang mengontrol agar Wajib Pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya karena dengan adanya kerugian yang akan didapat oleh wajib oajak apabila tidak membayar pajak yang secara otomatis akan membuat wajib pajak harus berfikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (normal pajak) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar pajak.

Menurut Piri (2013), sanksi hukum terhadap Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari 3 (tiga), yaitu:

1. Sanksi Sosial

Kesepakatan tentang sanksi sosial yang akan diberikan kepada mereka yang lalai atau tidak membayar PBB harus merupakan kesepakatan bersama di daerah tersebut sehingga berlaku semacam hukum adat. Sanksi sosial terpisah dari sanksi administrasi dan karena sifatnya lebih bersifat teguran, sindiran, peringatan, dan membuat malu bagi yang terkena sanksi sosial.

2. Sanksi Administrasi

- a. Apabila wajib pajak terlambat mengembalikan SPOP, dan setelah ditegur secara tertulis, SPOP tidak disampaikan juga sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, maka wajib pajak akan ditagih pokok pajaknya ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda 25% dari pajak terutang.
- b. Apabila wajib pajak mengisi SPOP tidak sesuai dengan kenyataannya dan setelah diperiksa ternyata besar pajak terutang lebih kecil dari perhitungan data yang sebenarnya. Maka, wajib pajak akan ditagih dengan jumlah selisih pajak terutang dengan sanksi administrasi sebesar 25% dari selisih tersebut.
- c. Apabila wajib pajak tidak membayar/kurang bayar pajak terutang setelah jatuh tempo. Maka wajib pajak akan ditagih sebesar jumlah yang belum dibayar ditambah denda administrasi sebesar 2% perbulan.

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana terhadap pelanggaran dan kejahatan terhadap PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyebutkan bahwa yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena kealpaan akan dikenakan sanksi. Wajib pajak yang terbukti kealpaannya dan menyebabkan kerugian pada negara dalam hal:

- a. Tidak mengembalikan SPOP
- b. Mengembalikan SPOP akan tetapi isinya tidak benar. Sanksi pidananya adalah kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak terutang.

- c. Memperlihatkan surat/dokumen palsu, serta tidak menyampaikan surat atau dokumen yang diperlukan. Sanksi pidananya, penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali lipat pajak terutang.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa ada dua jenis sanksi yaitu:

1. Sanksi administrasi yang terdiri dari:
 - a. Sanksi administrasi berupa denda
 - b. Sanksi administrasi berupa bunga
 - c. Sanksi administrasi berupa kenaikan
2. Sanksi pidana yang terdiri dari:
 - a. Sanksi kurungan
 - b. Sanksi penjara

Merasakan dampak jika tidak membayar PBB, mengerti arti sanksi pajak, mengetahui tata cara pembayaran PBB, dan membayar PBB tepat waktu merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur kepatuhan wajib pajak menurut Siti Fatimah (2014) dalam Siregar dan Rahayu (2018).

2.11 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib

Pajak Bumi dan Bangunan

Dengan diterapkan sanksi pajak secara tegas dan nyata oleh Pemerintah daerah, diharapkan membuat para Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memenuhi seluruh persyaratan dan membayarkan pajaknya dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan Undang-Undang sehingga akan membuat kepatuhan

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan meningkat. Apabila pemberian sanksi yang berat dan tegas ini telah dijalankan dengan benar tanpa toleransi kepada para pelanggar, maka para wajib pajak akan melaksanakan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan sehingga membuat terjadinya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Rahayu *et al.*, (2018), Ayunda *et al.*, (2015), Fitriyaningsih *et al.*, (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sehingga, berdasarkan uraian diatas maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha3: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

2.12 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sikap Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib PBB-P2

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Rahayu *et al.*, (2018) bahwa sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan sosialisasi berpengaruh positif secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian yang dilakukan oleh Ayunda *et al.*, (2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan dan sikap Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Sedangkan pengetahuan pajak dan tingkat ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Selain itu, adanya kontrol petugas kelurahan dapat memperkuat pengaruh antara sanksi perpajakan, pengetahuan pajak, dan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitrianiingsih (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, kemudian pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan sanksi denda secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut penelitian Budhiartama dan Jati (2016), bahwa sikap Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2.13 Model Penelitian

Gambar 2.1
Model Penelitian

